

Bridging the Research to the Role and Function of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"

EXPOSURE MATERIALS

03-04 Mei 2021
Teraskita Hotel, Jakarta

SEMINAR DAN FOCUS GROUP DISCUSSION

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL**



Bridging the Research to the Role and Function of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"



EXPOSURE MATERIALS

1. *Exposure Materials*
2. *Exposure Materials*

SEMINAR DAN FOCUS GROUP DISCUSSION

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

SAMBUTAN

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum.

Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Ucapan terima kasih dan salam hormat secara khusus kami sampaikan kepada Bapak Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A. sebagai Anggota Komisi VIII yang telah berkenan hadir dan menjadi *Keynote Speaker* dalam acara Seminar dan FGD dengan tema “Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI. Kami di Badan Keahlian DPR RI melaksanakan tugas yang di amanatkan dalam undang-undang, yaitu memberi dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Dalam pemerintahan yang demokratis, *Checks and Balances* itu keniscayaan agar kepentingan rakyat dapat dilaksanakan dengan baik dan pemerintah benar-benar mampu menjalmkannya, maka fungsi counter dari DPR RI harus kuat. Namun permasalahannya adalah fungsi counter ini perlu didukung dengan data yang kuat dan pemahaman substansi yang baik. Untuk itu Badan Keahlian hadir untuk memperlihatkan fakta ilmiah dalam proses pengambilan kebijakan melalui pendekatan “*Evidence Legislative Policy Making*” yang salah satunya diwujudkan melalui kegiatan seminar dan FGD.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Zudan Arif F., S.H., M.H., Dirjen DukCapil Kementerian Dalam Negeri; Bapak Achy Karyono, Staf Ahli Menteri Sosial; Bapak Iwan Taufiq Purwanto, S.E., M.B.A., CGCAE., CRMP., QIA, Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan seluruh sivitas akademika yaitu Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Ketua Pusbitep Universitas Nasional, Direktur dan Kepala Lembaga Penelitian Politeknik Kesejahteraan Sosial, dan Ketua Umum Himpunan Peneliti Indonesia, yang telah berpartisipasi memberikan pandangannya pada acara seminar dan FGD tersebut. Kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat (dih. Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri), BPKP dan perguruan tinggi menjadi penting dalam mendukung efektivitas perbaikan pengelolaan DTKS guna terwujudnya DTKS yang akurat, mutakhir dan akuntabel.



PENGANTAR

Drs. Helmizar, M.E

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI

Seminar dan FGD dengan tema “Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial” yang kami selenggarakan pada tanggal 3-5 Mei 2021 merupakan wujud nyata Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung fungsi DPR RI untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan program perlindungan dan jaminan sosial. Pemerintah telah menciptakan suatu basis data yang disebut dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS. Kesuksesan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial sangat bergantung pada DTKS yang akurat dan mutakhir. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak terdapat permasalahan dalam pengelolaan DTKS, antara lain:

- ❖ Terdapat penduduk yang seharusnya berhak menerima bantuan namun datanya tidak terdapat dalam DTKS serta sebaliknya.
- ❖ Penggunaan DTKS belum dapat meminimalisir permasalahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak terdistribusi dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak bertransaksi pada penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
- ❖ Adanya permasalahan pengelolaan DTKS pada aspek ketersediaan anggaran; kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan SDM; ketersediaan dan kualitas sarana prasarana; dan ketersediaan regulasi penunjang di daerah.

Pada kesempatan Seminar dan FGD tersebut, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI berdiskusi dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan seluruh sivitas akademika yaitu Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Ketua Pushtep Universitas Nasional, Direktur dan Kepala Lembaga Penelitian Politeknik Kesejahteraan Sosial, dan Ketua Umum Himpunan Peneliti Indonesia.

Berdasarkan hasil diskusi dengan para narasumber, terdapat beberapa saran perbaikan yang perlu mendapatkan perhatian bagi para pembuat dan pelaksanaan kebijakan guna mewujudkan DTKS yang akurat, mutakhir dan akuntabel, antara lain:

- ❖ Perlu dasar hukum untuk memastikan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menganggarkan kegiatan pendataan dan verval DTKS secara memadai dan berkelanjutan.
- ❖ Perlu adanya integrasi sistem secara penuh antara DTKS dengan Data Kependudukan untuk meningkatkan kualitas DTKS.
- ❖ Perlu pelibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan DTKS untuk mengakomodasi dinamika kependudukan. Oleh karena itu, perlu segera dirumuskan secara detail mekanisme pelibatan perguruan tinggi tersebut.
- ❖ Perlu segera memperkuat payung hukum pengelolaan DTKS dengan meningkatkan statusnya menjadi Undang-Undang.
- ❖ Perlu adanya regulasi yang mengatur kuantitas petugas pendata, kualifikasi petugas pendata, dan standar honorarium petugas pendata.



KEYNOTE SPEECH

Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI



Pada baris terakhir Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, sekaligus merupakan sila ke-Lima Pancasila tercantum salah satu tujuan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 pada ayat (1) dinyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlahtar dipelihara oleh negara".

DPR dan Pemerintah sebagai *Duty Bearer* terus berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dan menjalankan mandat pemenuhan hak keadilan sosial bagi fakir miskin. Salah satunya melalui penyelenggaraan program perlindungan sosial dalam rangka pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional yang baik adalah yang dilakukan secara terencana, mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, diimplementasikan sesuai rencana, dan kemudian dipantau dan dievaluasi untuk perbaikan ke depan. Lima tahapan pembangunan ini memerlukan ketersediaan data yang akurat, terbarukan, dan dapat diakses dengan mudah. Selama 3 dekade terakhir, pendataan kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami minimal 2-3 kali perubahan standar untuk meningkatkan akurasi data kemiskinan Indonesia yang kemudian dikembangkan dengan satu sistem yang dikelola oleh Kementerian Sosial yang kemudian selanjutnya dikenal dengan istilah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DPR RI sangat mendukung pengelolaan data secara terpadu untuk meningkatkan kesuksesan perlindungan sosial yang lebih berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Dukungan ini tercermin pada persetujuan Komisi VIII DPR RI atas usulan anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp1,27 triliun untuk pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam sistem pendataan terpadu yang berjalan saat ini. Permasalahan tersebut di antaranya adalah:

- ❖ Masih belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan;
- ❖ Masih belum memadainya jumlah, kualitas, dan honor SDM petugas pendata dan petugas verval DTKS;
- ❖ Belum terwujudnya sistem yang terintegrasi antara DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial dengan Data Kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri;
- ❖ Belum memadainya perangkat dan logistik pendataan dan verval;
- ❖ Belum jelasnya struktur organisasi, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan SOP terkait kegiatan verval DTKS; serta
- ❖ Terdapatnya pembatasan kuota pemrosesan data pada Disdukcapil.

Dengan dukungan DPR RI tersebut, maka perbaikan dalam penyelenggaraan DTKS dapat menghasilkan peningkatan kinerja perlindungan sosial di Indonesia, sehingga ketepatan data akan menjadikan pemecahan, penganggaran, implementasi, dan pemantauan evaluasi program perlindungan sosial yang lebih terukur yang akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mewujudkan perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI.....	i
PENGANTAR KEPALA PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	iii
KEYNOTE SPEECH ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI.....	v
DAFTAR ISI	vii
PAPARAN NARASUMBER SEMINAR	1
Adhy Karyono, Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	3
Zudan Arif Fakrulloh, Sinkronisasi Data Kependudukan Dengan DTK.....	15
Iwan Taufiq Purwanto, Pelibatan BPKP dalam Mewujudkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Akurat dan Mutakhir	27
PAPARAN NARASUMBER FOCUS GROUP DISCUSSION	35
Amany Lubis, Strategi Perguruan Tinggi Sebagai <i>Quality Assurance</i> Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.....	37
Zulmasyhur, Pelibatan Perguruan Tinggi Sebagai <i>Quality Assurance</i> DTKS yang Berkualitas, Akurat dan Mutakhir	43
Syahrir Ika, Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.....	51
Marjuki & Suharma, <i>New DTKS</i> : Permasalahan, Tantangan dan Peran Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.....	87
FOTO KEGIATAN	101



PAPARAN NARASUMBER SEMINAR

Adhy Karyono

Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

CURRICULUM VITAE

ADHY KARYONO, AKS., MAP
STAFF AHLI MENTERI SOSIAL BIDANG PERUBAHAN
DAN DINAMIKASOSIAL

Pangkat/Golongan
Pembina Utama Muda/lvc
Email

adhy.karyono@kemsos.go.id



Riwayat Pendidikan

- ☐ DIV Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
- ☐ S2 Magister Administrasi Publik STIA LAN

Riwayat Pekerjaan

- ☐ Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- ☐ Kepala Biro Perencanaan
- ☐ Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial



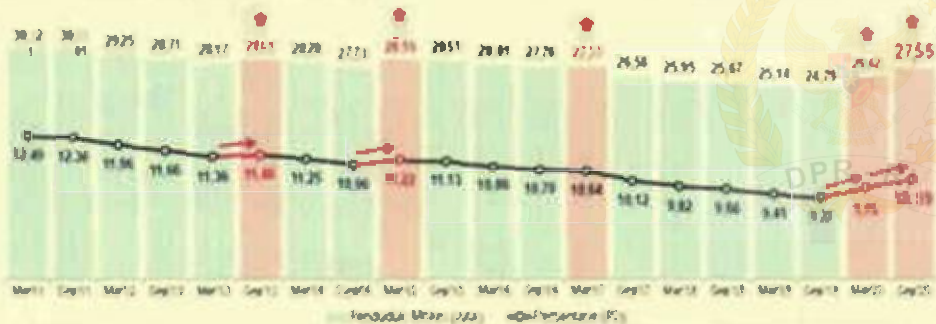
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DATA TERPADU KESEHATAN
SOSIAL (DTKS)

ADHY KARYONO

DESAK ARIYANTI, SITIKAH, ANINDY,
PRADJITAN & DINDIKA SUDIR



KEMISKINAN DI INDONESIA PER SEPTEMBER 2020



- Angka kemiskinan Maret dan September 2020 naik dibandingkan dengan tahun 2019. Per September 2021, angka kemiskinan sebanyak 27,55 juta (10,19%).
- Pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk, dan kemudian mendorong terjadinya peningkatan kemiskinan.
- Intervensi perlindungan sosial diharapkan dapat menekan jumlah penduduk miskin baru.

STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN



MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN

SANTUAN SOSIAL



pendapatan
di atas Rp 500



pendapatan
di atas Rp 500



pendapatan
di atas Rp 500



pendapatan
di atas Rp 500



pendapatan
di atas Rp 500



pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500

pendapatan
di atas Rp 500



DATA KEPENDUKUKAN

REHABILITASI SOSIAL UNTUK LANSIA, PENYANDANG DISABILITAS



MEMINGKATKAN PRODUKTIVITAS/PENDAPATAN

PENINGKATAN USAHA

- Penyediaan modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah
- Penyediaan modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah
- Penyediaan modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah
- Penyediaan modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah
- Penyediaan modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah

LAPANGAN PEKERJAAN

- Penyediaan lapangan kerja
- Penyediaan lapangan kerja
- Penyediaan lapangan kerja

PEMEMUHAN KEBUTUHAN DASAR

PEMERINTAH DATA KEPENDUKUKAN RASIAL DATA TERPADU
PEMERINTAH & PEMERINTAH DAERAH

KEMANDIRIAN SOSIAL EKONOMI

PARTISIPASI DUNIA USAHA, MASYARAKAT, HIDUP KERJASAMA LUAR NEGERI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN REFORMASI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

1. Transformasi Data Menuju Registrasi Sosial-Ekonomi

Perbaikan data dan mengembangkan sistem penataan terintegrasi dengan cakupan 100% penduduk.

6. Integrasi Program

Integrasi dan koordinasi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial di Pusat serta Daerah.

5. Pengembangan Mekanisme Distribusi

Pengembangan distribusi secara digital (untuk transfer tunai)



2. Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif

Adaptasi skema perlindungan sosial sesuai bencana alam dan non alam

3. Digitalisasi Penyaluran

Pemeriksaan profil pendigital (integrasi data) e-KYC dan verifikasi secara online berbasis portal baru, pembayaran pembantuan dan fitch

4. Reformasi Skema Pembayaran

Pengembangan skema pembayaran yang inovatif, efisien dan berkeadilan

Sumber: Bappenas

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 2021

REKAPITULASI PROGRAM PEN 2021



ANGGARAN PEN 2021 NAIK 21%

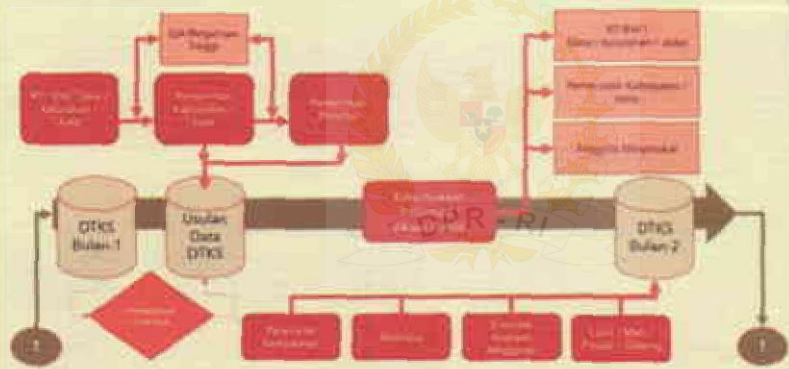
Anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 meningkat Rp6.699,41 triliun, meningkat 21 persen dari alokasi PEN 2020. Program PEN 2021 akan dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19.



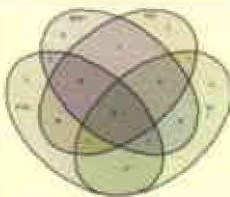
**PETA PENERIMA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIALDI MASA PANDEMI COVID-19
TA 2020**

[illegible]

SMART DTKS: SIKLUS PERBAIKAN DAN TRANSPARANSI



KONDISI AWAL MASTER DATABASE DTKS



DATA SUMBER

KNT

KNT

KNT

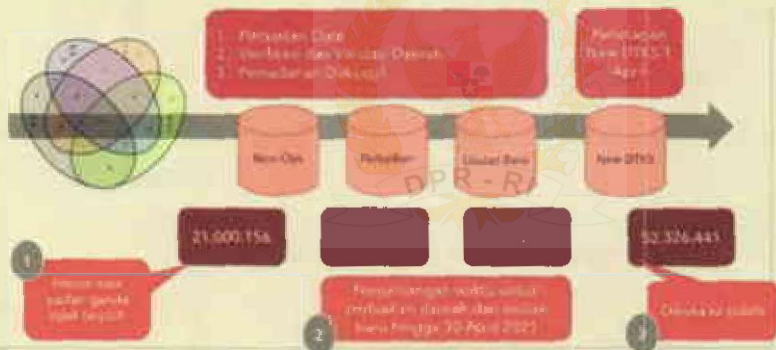
KNT

2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028
2029-2030
2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050
2051-2052
2053-2054
2055-2056
2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076
2077-2078
2079-2080
2081-2082
2083-2084
2085-2086
2087-2088
2089-2090
2091-2092
2093-2094
2095-2096
2097-2098
2099-2100

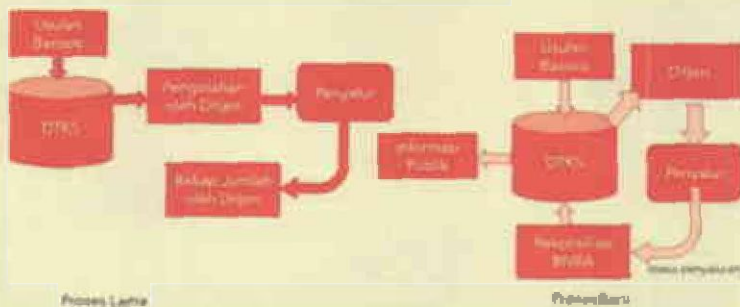
SEHARUSNYA



NEW DTKS PER 30 APRIL 2021



PROSES LAMA VS PROSES BARU



UPAYA PERBAIKAN DTKS

- Melakukan pemadanan DTKS dengan NIK, bekerjasama dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
- Melibatkan Perguruan Tinggi sebagai *quality assurance* pemutakhiran data.
- Membuka akses DTKS ke publik untuk transparansi melalui aplikasi <https://cekbanasos.kemensos.go.id>.
- Melakukan Kerjasama dengan K/L terkait untuk peningkatan kualitas DTKS, misalnya Lapan terkait dengan data penginderaan jarak jauh untuk memperkaya DTKS.
- Penetapan DTKS per bulan untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi di masyarakat.

Transparansi DTKS, melalui [www.cekbanasos.kemensos.go.id](https://cekbanasos.kemensos.go.id), Selanjutnya akan dilakukan peningkatan fitur terkait usulan baru dan sanggahan atas kepartasan penanma bantuan sosial

DTKS
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

No. Data Pengantar
No. Kartu Keluarga
No. Data Pendaftaran
No. Data Pengantar
No. Data Pengantar

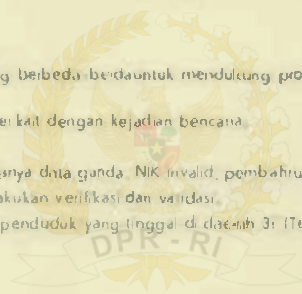
Apakah data ini benar?
Apakah data ini sudah diperbarui?

Simpan
Batal

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
© 2019 - 2020

TANTANGAN

- Komitmen dan kapasitas fiskal daerah yang berbeda-beda untuk mendukung proses verifikasi dan validasi data
- Data kemiskinan yang dinamis, misalnya terkait dengan kejadian bencana
- *Exclusion dan inclusion error*
- Adanya permasalahan terkait dengan adanya data ganda, NIK invalid, pembaharuan
- SDM yang memadai di daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi
- Kondisi geografis yang luas dan terdapat penduduk yang tinggal di daerah 3i (Tertinggal, Terdepan, Terluar)



KEMENTERIAN SOSIAL RI
Jl. Salemba Raya No. 28
Jakarta 10430



www.kemosos.go.id



@kemensosri



@KemensosRI



Zudan Arif Fakrulloh

Sinkronisasi Data Kependudukan Dengan DTKS

CURRICULUM VITAE

PROF. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH

**DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Tempat/Tanggal Lahir

Sleman, 24 Agustus 1969

Jabatan Akademik

Guru Besar Ilmu Hukum sejak 1 Oktober
2004 dalam usia 35 tahun



Riwayat Jabatan

- | | |
|---|--------------------|
| - Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri | 2011-2014 |
| - Ketua Program S3 Ilmu Hukum Universitas Borobudur | 2011-2016 |
| - Staf Ahli Mendagri Bid. Hukum, Politik dan HAM | 2014-2015 |
| - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2015-sekarang |
| - Plt dan Pj Gubernur Provinsi Gorontalo | Okt 2016- Mei 2017 |
| - Komisaris Independent Bank Mandiri Taspen | 2018-sekarang |

Lain-Lain

- | | |
|---|-----------------|
| - Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional | 2015 – sekarang |
| - Ketua Umum Federasi Karate Tradisional Indonesia | 2015-2019 |
| - Ketua Umum Rumah Bonsai Indonesia | 2017-sekarang |
| - Ketua Badan Pengelola Masjid An'Nuur Kemendagri | 2014-sekarang |
| - Ketua IKA FH UNS | 2018-sekarang |
| - Dosen Pascasarjana : Universitas Borobudur,
Jayabaya, UI, UNS, IPDN, UPH, Untag Surabaya | |



SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DTKS

Seminar Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Jenderal DPR RI



Prof. Dr. Zulfan Arif Fokruddin, SH, MH
Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

03 Juli 2021

DASAR HUKUM

UUD 1945

UU No 23
Tahun 2006

UU No 24
Tahun 2013

UNSUR BERDIRINYA SUATU NEGARA

- Perintah
- Wilayah
- Pemerintahan
- Pengakuan negara lain

TUGAS NEGARA

1. Memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Pemeluk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat dan lengkap dan Gratis.
2. Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK

- ☐ memberikan kepastian identitas
- ☐ memberikan perlindungan status hukum bagi penduduk
- ☐ menyediakan data dan informasi kependudukan nasional
- ☐ mewujudkan tertib administrasi kependudukan nasional dan terpadu
- ☐ menyediakan data penduduk yg menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya

Jumlah Penduduk
271,349,889 jiwa

Jumlah KK
86.437.053 jiwa

Laki-laki
137,119,901 jiwa

Perempuan
134,229,988 jiwa



DATA KEPENDUDUKAN
SEMESTER II 2020

Jumlah Perekaman Tahun 2020



Wajib KTP
196,394,976



Rekam
194,649,012 (99.11 %)



Belum Rekam
1.745.964



Target Perekaman Tahun 2021



Wajib KTP
200,426,767



Target Perekaman
5,777,755

Persentase
Belum Manjadi
97.12%

Sisa Perekaman
thn 2020
2,745,964

Wajib KTP
Pemula
8,031,793



UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006

Pasal 13, Ayat (3):

NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 58, Ayat (4):

Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

PENGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN

01

PILEG/PILPRES
Tahun 2014 &
2019

02

PLUKADA Thn
2015,
2017, 2018 &
2020

03

Baseline
SP2020
oleh BPS

04

Desar
perhitungan
DAU,
DAK dan Dana
Desa

05

Verifikasi data
bersos
dan subsidi

06

Verifikasi dan
validasi
data
pelayanan
publik

INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN BERBAGAI LEMBAGA

54 K/L sudah menandatangani MoU

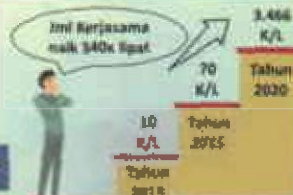
3.466 lembaga sudah PKS

2.163 lembaga pusat telah melakukan PKS
1.304 OPD telah melakukan PKS

**Jumlah
Akses NIK**

Data per
April 2021

5,871,649,318





NIK
adalah kunci akses dalam
verifikasi data



Pola Koordinasi



DENGAN DASRAH

Kemensos, Ditjen Dukcapil, Dinas Dukcapil dengan Dinas Sosial turun secara bersama2 dalam melakukan perekaman KTP-el sekaligus melakukan pendataan dan pemberian bansos



DENGAN KEMENSOS

Memenuhi permintaan data dan permintaan pemadanan data bantuan sosial dari Kemensos

PEMUTAKHIRAN DATA MELALUI TRANSAKSI KEPENDUDUKAN



PEMUTAKHIRAN MELALUI TRANSAKSI KEPENDUDUKAN

Data bansos dapat dimutakhirkan melalui update transaksi kependudukan yaitu lahir, mati, kawin, cerai, pindah dan datang



INTEGRASI DATA

Integrasi Data K/L yang sudah sinkron dengan data kependudukan terhadap data DTKS

**KEMENDAGRI, KEMENSOS, DINAS DUKCAPIL DAN
DINAS SOSIAL MELAKUKAN PEREKAMAN KTP-EL
BAGI PENERIMA BANTUAN TETAPI BELUM
MEMILIKI KTP-EL SEKALIGUS PEMBERIAN BANSOS**



**PEREKAMAN KTP-el
WARGA MARGINAL
KERJASAMA KEMENDAGRI DAN KEMENSOS
DI GEUDUNG ANEKA BHAKTI KEMENSOS
13 JANUARI 2021**



PEREKAMAN KTP-41 WARGA MARGINAL PENYANDANG
MASALAH KESEHATAN SOSIAL (PMKS)
KERJASAMA KEMENDAGRI DAN KEMENSOS
DI JAKARTA
13 JANUARI 2021



PEREKAMAN KTP-41 SUKU ANAK DALAM JAMBI
KERJASAMA KEMENDAGRI DAN KEMENSOS, DINAS
DUKCAPIL DAN DINAS SOSIAL
DI BATANGHARI DAN SAROLANGUN
8-10 MARET 2021

SINKRONISASI DTKS DENGAN DATA KEPENDUDUKAN



- 1 **DTKS penetapan 2018**
Data awal 99.352.714, Data sesuai 68.880.711
 - 2 **DTKS penetapan Okt 2019**
Data awal 98.604.086, Data sesuai 74.554.113, Meninggal 111.272
 - 3 **DTKS penetapan Januari 2020**
Data awal 97.204.424, Data sesuai 79.110.242, Data meninggal 234.275
 - 4 **Data gabungan profil (DTKS penetapan Okt 2020, PBI Non DTKS, ART Non DTKS, BSP Non DTKS, PIH Non DTKS, Basmos tambahan usulan)**
Data awal 128.450.803, Data sesuai 107.766.593, Meninggal 2.655.642
- PERBAIKAN DATA**
- a **Data NIK, NIKSI, RTK, BSL, PBI DAN RESPON NIK**
Data awal 1.715.344, Data sesuai 1.275.857, Meninggal 17.916
 - b **Data valid penduduk Indonesia termasuk NIK valid**
Data awal 1.344.743, Data sesuai 1.194.857, Meninggal 149.886



SINKRONISASI DATA KEMENSOS DAN DITJEN DUKCAPIL

- c **Data pemenuhan kewajiban 6 bulan untuk yg gagal bayar**
Data awal 5.361.116, Data sesuai 4.147, Meninggal 17.808
- d **Data pemenuhan program bantuan utk pengajuan DTKS Semesta**
Data awal 6.225.256, Data sesuai 6.595.382, Meninggal 44.152
- e **Data NIK dan Dalam**
Data awal 6.166, Data sesuai 2.556, Meninggal 9
- f **Data PBI, KPMH dan BSL**
Data awal 441.314, Data sesuai 442.511, Meninggal 9.431

SAMPAI DENGAN TGL 27 APRIL 2021 DTKS YANG SUDAH SINKRON DENGAN DATA KEPENDUDUKAN JUMLAH 116.962.970 JIWA + DIWA 10 JT JIWA

**INTEGRASI DATA PELAYANAN KEPENDUDUKAN
UNTUK UPDATE DTKS
(Lahir, Mati, Pindah, Datang, Kawin, CeraI)**

PERUBAHAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM TRANSAKSI PELAYANAN DATA
KEPENDUDUKAN

INDONESIA

♥ Lahir : 113,057 jiwa
♥ Mati : 88,625 jiwa
♥ Pindah datang : 498,213 jiwa

♥ Lahir : 71,291 jiwa
♥ Mati : 93,043 jiwa
♥ Pindah datang : 499,051 jiwa

♥ Lahir : 41,639 jiwa
♥ Mati : 105,111 jiwa
♥ Pindah datang : 525,834 jiwa

Jan

Feb

Mar

tahun
2021

INFORMASI TRANSAKSI KEPENDUDUKAN
UNTUK MEMUTAKHIRKAN DATA INSTANSI PENGOLINGA
MELALUI TRANSAKSI LAYANAN KEPENDUDUKAN

Pelayanan SIAK - DTKS

Integrasi DTKS dengan Transaksi
Pelayanan Kependudukan

Lahir
Mati
Pindah
Datang
Kawin
Ceraai



**INTEGRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK UPDATE DTKS**



DATA KEPENDUDUKAN YANG SUDAH SINKRON DENGAN DATA K/L



HASIL INTEGRASI PENERIMA BANTUAN (DTKS DENGAN DATA K/L



INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DATA K/L

FLAGGING DATA INDIVIDU PENDUDUK

NIK SEBAGAI
KUNCI DAN
PENGHUBUNG
DATA-DATA
ANTARK/L



NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

NIK

Iwan Taufiq Purwanto

Pelibatan BPKP dalam Mewujudkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
yang Akurat dan Mutakhir

CURRICULUM VITAE

IWAN TAUFIQ PURWANTO, S.E., M.B.A., CGCAE., CRMP., QIA
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG POLHUKAM PMK BPKP

OVERSEAS TRAINING

- Public Accountability and Internal Control pada Groningen University, the Netherland (2010)
- Internal Audit Capability Model (IACM) oleh the Institute of Internal Auditor di Ohio, USA (2012)
- Strategic Planning and Budgeting di Brussel, Belgia (2015)
- Big Data Scientist di Perth Australia (2016)
- Risk Based Internal Audit, Queensland University, Australia (2018)

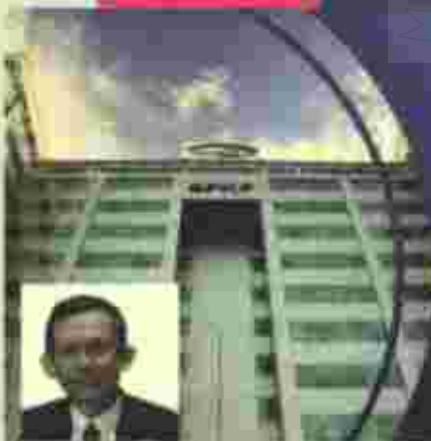


ACADEMIC HISTORY

- INANZAN UNIVERSITY, NAGOYA, JEPANG MASTER OF BUSSINESS ADMINISTRATION 1999-2001
- UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS EKONOMI SELESAI TAHUN 1996
- SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA AJUN AKUNTAN SELESAI TAHUN 1990

CAREER SUMMARY

- DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG POLHUKAM PMK (2020 - SEKARANG)
- DIREKTUR PENGAWASAN BIDANG SDM DAN KEBUDAYAAN (2019-2020)
- DIREKTUR PENGAWASAN BIDANG POLSOSKAM LAINNYA (2017-2019)
- KEPALA PUSAT INFORMASI PENGAWASAN (2016-2017)
- KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO (2015-2016)
- KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PERDAGANGAN (2014-2015)
- KEPALA BIDANG AKUNTAN NEGARA PERWAKILAN BPKP JAWA BARAT (2011-2014)
- KEPALA BIDANG AKUNTAN NEGARA PERWAKILAN BPKP ACEH (2009-2011)
- KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR (2006-2009)
- FUNGSIONAL AUDITOR TIM PENGEMBANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE (2001-2008)
- FUNGSIONAL AUDITOR PADA DEPUTI PENGAWASAN PERMINYAKAN DAN GAS BUMI (1990-1998)



Iswan Taufiq Purwananto, S.E., M.S.A., CMC&E, CS&RP, C&E
Deputi Kepala BPKP Bidang NIP Bidang Publikasi BPKP

Rapat Badan Keahlian Sekjen DPR

**Partisipasi BPKP
dalam Menyajikan Data
Terpadu Kesejahteraan
Sosial yang Akurat dan
Mutakhir**

3 Mei 2021





DASAR HUKUM



UU 12 Tahun 2011 Perlindungan
Fakir Miskin

Verifikasi dan validasi rumah tangga miskin oleh Menteri, Bupati/Walikota, dan Masyarakat
Pemeriksaan Data Terpadu oleh K/L, Pemda, dan masyarakat
Data terpadu yang telah ditetapkan Menteri menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk
memberikan Bantuan Langsung Pembayaraan

UU 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah

Pengelolaan Data Fakir Miskin Nasional oleh Pemerintah Pusat
Pengelolaan Data Fakir Miskin sebagai dasar provinsi oleh Pemerintah Provinsi
Pengelolaan dan Pengelolaan data fakir miskin sebagai daerah kabupaten oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota

Permenas 28 Tahun 2017 dan
Permenas 5 Tahun 2019 (diubah
dengan permentas 11 tahun 2019)

Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu, Perlindungan Fakir Miskin dan Orang
Tidur. Untuk berperan sebagai bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Perlindungan Fakir Miskin dan Orang
Tidur. Mampu agar data penerima program valid tepat sasaran dan tepat waktu
Data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan
pengalangan di Kementerian Sosial, pusat, daerah dengan baik, akurat dan
berkelanjutan

UU Nomor 17 Tahun 2003,
UU Nomor 1 Tahun 2004,
UU Nomor 15 Tahun 2004

Keuangan negara dikelola secara terbuka berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan
Semua pengeluaran negara termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan
program pemerintah pusat, dibayar dengan APBN

PP 60 Tahun 2008

Aparat pengawasan intern pemerintah (BPKP dan/atau APSP) melakukan Pengawasan Intern
atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Internal Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

BPKP memiliki tugas pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban Akuntabilitas Keuangan dan pembangunan nasional/daerah

Surat Menteri Sosial Nomor:
S-8/MS/8/2/PS.01/1/2021

BPKP melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program serta kegiatan di
lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2021



HASIL PENGAWASAN ATAS AKURASI DATA BANTUAN SOSIAL

Data PKH, PKT, BPNT, Bantuan Pangan, dan APBD Tahun 2020

Cleaning Data Nasional 2020

- NIK ganda
- NIK invalid
- Menerima lebih dari 1 jenis bantuan

Cleaning Data Bansos APBD 2020

- Menerima lebih dari 1 jenis bansos
- KPM Ganda

PENERIMA BANTUAN SOSIAL



Monitoring Data Sahur Bansos Tahun 2021 oleh BPKP & APIP

- NIK tidak padan antara pusat dan daerah
- Kendala akses ke SIKS-NG dan Dukcapil (kurangnya terpadu, permasalahan jaringan internet)
- SDN terdistribusi
- Kurangnya sosialisasi cara perbaikan data

REKOMENDASI BPKP

- Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kemendagri untuk menyelesaikan masalah NIK tidak padan, serta menambah kuota pemadanan
- Mendukung Dinas kalyanitas untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak (Dinas Dukcapil, Kelurahan, Pendamping PKH, dan TIKOL) untuk membantu proses perbaikan data
- Menambah kapasitas user dan bandwidth SIKS-NG
- Meningkatkan sosialisasi cara perbaikan data

Program Pengawasan Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan 2020

- Terdapat Pemda yang belum menetapkan secara formal Struktur Organisasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu
- DTKS belum dilakukan updating secara berkala (Informasi tambahan: Per April 2020 terdapat 112 Pemda yang melakukan perbaikan data sama sekali)
- Pemberian bansos yang tidak berdasarkan DTKS
- Pemda tidak memiliki program terpadu Akses Masyarakat terhadap Perlindungan Sosial





TERIMA KASIH

Orchestra - AKSI Pengamalan Pancasila Indonesia Bangkit



PAPARAN NARASUMBER FOCUS GROUP DISCUSSION

Amany Lubis

Strategi Perguruan Tinggi Sebagai *Quality Assurance* Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial

CURRICULUM VITAE

PROF. DR. HJ. AMANY LUBIS, MA
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Tempat/Tanggal Lahir

Kairo, 22 Desember 1963

Jabatan

Rektor

Riwayat Pendidikan

- SDN Situ Gintung II Pagi, Rempoa, Ciputat, 1975
- SMP Al-Azhar, Kairo, 1979
- SMA (Biologi) Al-Azhar, Kairo, 1983
- Sarjana Terbaik (Licence) Fakultas Bahasa-Bahasa dan Terjemah Langsung (Arab-Inggris), Universitas Al-Azhar, Kairo, 1988
- Magister (M.A.) Ilmu Agama Islam/sejarah Kebudayaan Islam Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1993
- Doktor (DR.) Pengkajian Islam/Sejarah Kebudayaan Islam Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002

Riwayat Jabatan

1. 2000-2002, Ketua Program dan Konsultan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia Pondok Pinang, Jakarta.
2. 2003-2009, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. 2011-2013, Deputi Direktur Sekolah Pascasarjana Bidang Pengembangan Kelembagaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. 2019-2023, Rektu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.





PERMENSOS NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DATATERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pendataan, verifikasi, dan validasi, penetapan, dan penggunaan;

Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya. (Pasal 2)

PERMENSOS NOMORS TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DTKS (Lanj.)

Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi: a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. (Pasal 2)

Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan

Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. (Pasal 4)

PERMASALAHAN DI LAPANGAN TERKAIT PENGELOLAAN DTKS

Data warga yang sudah meninggal tidak tercatat sebagai data kesejahteraan sosial karena data kependudukan

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pendataan data terpadu kesejahteraan sosial adalah data yang sudah tercatat di tingkat kabupaten/kota belum terupdate di tingkat provinsi dan nasional

Kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang menyebabkan data terpadu kesejahteraan sosial belum terupdate

Pendataan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan secara terpisah-pisah antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang menyebabkan data terpadu kesejahteraan sosial belum terupdate

SARAN SOLUSI



PROGRAM KAMPUS YANG BERPOTENSI Mendukung PROGRAM KEMENSOS



Setiap tahun UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan program KKN yang diikuti oleh 4000-4500 mahasiswa.



Tahun 2021 terdapat 4604 mahasiswa yang tersebar di 33 provinsi, 201 kabupaten, dan 71 kota.



Kegiatan KKN dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Juni dan Agustus.

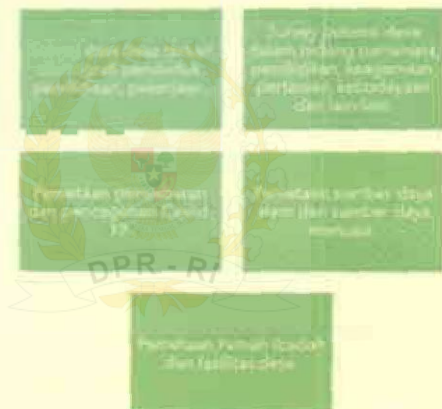
KUALITAS MAHASISWA KKN

- Memahami dan menguasai IT.
- Memiliki laptop sebagai sarana kuliah dan bekerja.
- Memiliki pengetahuan tentang tata kelola desa.
- Memiliki kemampuan bersosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat.

KUALITAS MAHASISWA KKN (Lanj.)

- Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah sering berkolaborasi dengan lembaga riset, maupun kementerian dalam hal pendataan (Seperti data penerima dana bergulir LPDB Kementerian Koperasi) dalam evaluasi program pinjaman.
- Secara psikologis dan sosiologis mahasiswa UIN Jakarta banyak berasal dari pedesaan sehingga dapat memperluas jangkauan program.

PROGRAM KKN 2021



PERAN PT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

- Salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan program pelatihan pengujian hingga sertifikasi pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada pemberdayaan dan peningkatan dalam bidang ekonomi.
- Peran PT dalam mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program seperti Social Investment Fund yang memberikan bantuan program Bumihutera (Tabung Kebutuhan Masyarakat) yang membantu lebih dari 10.000 orang di 10 provinsi di Indonesia untuk memiliki jaminan kesehatan rumah dan yang lainnya.

Zulmasyhur

Pelibatan Perguruan Tinggi Sebagai *Quality Assurance* DTKS yang Berkualitas, Akurat dan Mutahir

CURRICULUM VITAE

DR. ZULMASYHUR, M.Si.

KEPALA PUSAT STUDI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAH UNIVERSITAS NASIONAL

Organisasi yang diikuti

1. Ketua hanan Asosiasi Ilmuan
Administarsi seluruh Indonesia (ASIAN)
2. Ketua bidang hubungan internasional
pekerja sosial masyarakat Indonesia
(IPSM)
3. Ketua departemen pendidikan
pengurus karang taruna Indonesia
4. Peneliti relaan sosial TKSK

Jurnal Terindeks Scopus

- a. Fiscal Decentralization and Routine Conflict in Indonesia
- b. Causality on the Growth-Governance-Fiscal Decentralization Nexus : An Analysis of Time Series in Indonesia

Jurnal Internasional :

Group Dynamics and Cronyism in Village Development Planning Participation

Jurnal nasional :

Hubungan Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Solok, Sumatera Barat)



Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
Catatan Praktik Desentralisasi dan Demokrasi	2020	274	Leader publishing
Desentralisasi Formulasi Kebijakan dan Partisipasi	2018	225	Leader publishing
Sistem Informasi Manajemen dalam Perspektif Ilmu Administrasi Negara	2018	206	Leader publishing
Pendidikan Pancasila	2019	254	Leader publishing



Pelibatan Perguruan Tinggi Sebagai Quality Assurance Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas, Akurat Dan Mutakhir

Latar Belakang

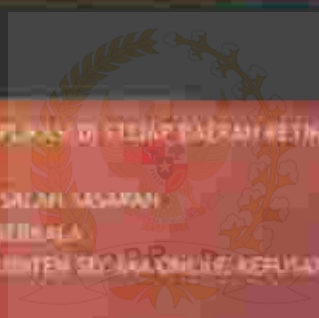
1. Tidak ada perguruan tinggi
2. *Could not find* (pembayaran sosial bereslah benar)
3. MASALAH DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
 - a) MASIH DITOLAKKANNYA INK GANDA
 - b) WAKTU PERBAIKAN DATA TERLALU CEPAT
 - c) RANTAI INK TIDAK SESUAI
 - d) UP DATE DATA TIDAK BERNAN SINGKRON DENGAN KONDISI NYATA, SEPERTI ADA YANG MENINGGAL MASIH ADA DALAM DATA , ADA YANG KAYA MASIH ADA DALAM DATA , PNS MASIH ADA DALAM DATA.

1) PENYALAHAN ETIKA MEMBAWA UPLAKS DI STASIUN KERETA
KORPRI

2) PAMITIAH MASA COVID BANYAK SALAH SASARAN

3) PERILU VERIFIKASI PENDATANGAN BERHAJA

4) LARANGAN BERKUNJUNG KE KANTORTEM SUDARA KONGKREKUSULAY



REGULASI

Sebelumnya pernah ada surat edaran jenderal Nomor 73 tahun 2019 tentang kode etik dan etika administrasi pemerintahan untuk
KorPRI - Gubernur 17.230

Peraturan 25 tahun 2018 tentang TASS

Untuk kode etik dan etika korPRI dan etika pemerintahan untuk
KORPRI - KPIS (KorPRI) 162. Masih ada korPRI yang belum
tanggap. Tidak ada yang tanggap dan tidak ada yang tanggap
di korPRI

PENGELOLAAN DATA TKSK

Sebelumnya dari 2.500 TKSK yang memiliki data yang terdistribusi sebanyak 7.000 orang

Terdapat 100 TKSK yang belum memiliki data NIK (satu)

1. Program khusus 51 orang data TKSK yang berjumlah 545 orang (dari 540 Kecamatan / Distrik)
2. Dan dari Program khusus 47 orang data TKSK yang berjumlah 205 orang (dari 218 Kecamatan / Distrik)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1. Berapa kualifikasi TKSK 1. 3000 (dari 2500 TKSK)

200 0 TKSK

500 10 TKSK 20 TKSK 30 TKSK 40 TKSK

2000 orang TKSK 7.000

2000

1000

500

200

100

50

20

10

5

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KUALIFIKASI BERDASARKAN UMUR

34-38	20-24
39-43	25-29
44-48	30-34
49-53	35-39
54-58	40-44
59-63	45-49
64-68	50-54
69-73	55-59
74-78	60-64
79-83	65-69
84-88	70-74
89-93	75-79
94-98	80-84
99-103	85-89
104-108	90-94
109-113	95-99
114-118	100-104
119-123	105-109
124-128	110-114
129-133	115-119
134-138	120-124
139-143	125-129
144-148	130-134
149-153	135-139
154-158	140-144
159-163	145-149
164-168	150-154
169-173	155-159
174-178	160-164
179-183	165-169
184-188	170-174
189-193	175-179
194-198	180-184
199-203	185-189
204-208	190-194
209-213	195-199
214-218	200-204
219-223	205-209
224-228	210-214
229-233	215-219
234-238	220-224
239-243	225-229
244-248	230-234
249-253	235-239
254-258	240-244
259-263	245-249
264-268	250-254
269-273	255-259
274-278	260-264
279-283	265-269
284-288	270-274
289-293	275-279
294-298	280-284
299-303	285-289
304-308	290-294
309-313	295-299
314-318	300-304
319-323	305-309
324-328	310-314
329-333	315-319
334-338	320-324
339-343	325-329
344-348	330-334
349-353	335-339
354-358	340-344
359-363	345-349
364-368	350-354
369-373	355-359
374-378	360-364
379-383	365-369
384-388	370-374
389-393	375-379
394-398	380-384
399-403	385-389
404-408	390-394
409-413	395-399
414-418	400-404
419-423	405-409
424-428	410-414
429-433	415-419
434-438	420-424
439-443	425-429
444-448	430-434
449-453	435-439
454-458	440-444
459-463	445-449
464-468	450-454
469-473	455-459
474-478	460-464
479-483	465-469
484-488	470-474
489-493	475-479
494-498	480-484
499-503	485-489
504-508	490-494
509-513	495-499
514-518	500-504
519-523	505-509
524-528	510-514
529-533	515-519
534-538	520-524
539-543	525-529
544-548	530-534
549-553	535-539
554-558	540-544
559-563	545-549
564-568	550-554
569-573	555-559
574-578	560-564
579-583	565-569
584-588	570-574
589-593	575-579
594-598	580-584
599-603	585-589
604-608	590-594
609-613	595-599
614-618	600-604
619-623	605-609
624-628	610-614
629-633	615-619
634-638	620-624
639-643	625-629
644-648	630-634
649-653	635-639
654-658	640-644
659-663	645-649
664-668	650-654
669-673	655-659
674-678	660-664
679-683	665-669
684-688	670-674
689-693	675-679
694-698	680-684
699-703	685-689
704-708	690-694
709-713	695-699
714-718	700-704
719-723	705-709
724-728	710-714
729-733	715-719
734-738	720-724
739-743	725-729
744-748	730-734
749-753	735-739
754-758	740-744
759-763	745-749
764-768	750-754
769-773	755-759
774-778	760-764
779-783	765-769
784-788	770-774
789-793	775-779
794-798	780-784
799-803	785-789
804-808	790-794
809-813	795-799
814-818	800-804
819-823	805-809
824-828	810-814
829-833	815-819
834-838	820-824
839-843	825-829
844-848	830-834
849-853	835-839
854-858	840-844
859-863	845-849
864-868	850-854
869-873	855-859
874-878	860-864
879-883	865-869
884-888	870-874
889-893	875-879
894-898	880-884
899-903	885-889
904-908	890-894
909-913	895-899
914-918	900-904
919-923	905-909
924-928	910-914
929-933	915-919
934-938	920-924
939-943	925-929
944-948	930-934
949-953	935-939
954-958	940-944
959-963	945-949
964-968	950-954
969-973	955-959
974-978	960-964
979-983	965-969
984-988	970-974
989-993	975-979
994-998	980-984
999-1003	985-989
1004-1008	990-994
1009-1013	995-999
1014-1018	1000-1004
1019-1023	1005-1009
1024-1028	1010-1014
1029-1033	1015-1019
1034-1038	1020-1024
1039-1043	1025-1029
1044-1048	1030-1034
1049-1053	1035-1039
1054-1058	1040-1044
1059-1063	1045-1049
1064-1068	1050-1054
1069-1073	1055-1059
1074-1078	1060-1064
1079-1083	1065-1069
1084-1088	1070-1074
1089-1093	1075-1079
1094-1098	1080-1084
1099-1103	1085-1089
1104-1108	1090-1094
1109-1113	1095-1099
1114-1118	1100-1104
1119-1123	1105-1109
1124-1128	1110-1114
1129-1133	1115-1119
1134-1138	1120-1124
1139-1143	1125-1129
1144-1148	1130-1134
1149-1153	1135-1139
1154-1158	1140-1144
1159-1163	1145-1149
1164-1168	1150-1154
1169-1173	1155-1159
1174-1178	1160-1164
1179-1183	1165-1169
1184-1188	1170-1174
1189-1193	1175-1179
1194-1198	1180-1184
1199-1203	1185-1189
1204-1208	1190-1194
1209-1213	1195-1199
1214-1218	1200-1204
1219-1223	1205-1209
1224-1228	1210-1214
1229-1233	1215-1219
1234-1238	1220-1224
1239-1243	1225-1229
1244-1248	1230-1234
1249-1253	1235-1239
1254-1258	1240-1244
1259-1263	1245-1249
1264-1268	1250-1254
1269-1273	1255-1259
1274-1278	1260-1264
1279-1283	1265-1269
1284-1288	1270-1274
1289-1293	1275-1279
1294-1298	1280-1284
1299-1303	1285-1289
1304-1308	1290-1294
1309-1313	1295-1299
1314-1318	1300-1304
1319-1323	1305-1309
1324-1328	1310-1314
1329-1333	1315-1319
1334-1338	1320-1324
1339-1343	1325-1329
1344-1348	1330-1334
1349-1353	1335-1339
1354-1358	1340-1344
1359-1363	1345-1349
1364-1368	1350-1354
1369-1373	1355-1359
1374-1378	1360-1364
1379-1383	1365-1369
1384-1388	1370-1374
1389-1393	1375-1379
1394-1398	1380-1384
1399-1403	1385-1389
1404-1408	1390-1394
1409-1413	1395-1399
1414-1418	1400-1404
1419-1423	1405-1409
1424-1428	1410-1414
1429-1433	1415-1419
1434-1438	1420-1424
1439-1443	1425-1429
1444-1448	1430-1434
1449-1453	1435-1439
1454-1458	1440-1444
1459-1463	1445-1449
1464-1468	1450-1454
1469-1473	1455-1459
1474-1478	1460-1464
1479-1483	1465-1469
1484-1488	1470-1474
1489-1493	1475-1479
1494-1498	1480-1484
1499-1503	1485-1489
1504-1508	1490-1494
1509-1513	1495-1499
1514-1518	1500-1504
1519-1523	1505-1509
1524-1528	1510-1514
1529-1533	1515-1519
1534-1538	1520-1524
1539-1543	1525-1529
1544-1548	1530-1534
1549-1553	1535-1539
1554-1558	1540-1544
1559-1563	1545-1549
1564-1568	1550-1554
1569-1573	1555-1559
1574-1578	1560-1564
1579-1583	1565-1569
1584-1588	1570-1574
1589-1593	1575-1579
1594-1598	1580-1584
1599-1603	1585-1589
1604-1608	1590-1594
1609-1613	1595-1599
1614-1618	1600-1604
1619-1623	1605-1609
1624-1628	1610-1614
1629-1633	1615-1619
1634-1638	1620-1624
1639-1643	1625-1629
1644-1648	1630-1634
1649-1653	1635-1639
1654-1658	1640-1644
1659-1663	1645-1649
1664-1668	1650-1654
1669-1673	1655-1659
1674-1678	1660-1664
1679-1683	1665-1669
1684-1688	1670-1674
1689-1693	1675-1679
1694-1698	1680-1684
1699-1703	1685-1689
1704-1708	1690-1694
1709-1713	1695-1699
1714-1718	1700-1704
1719-1723	1705-1709
1724-1728	1710-1714
1729-1733	1715-1719
1734-1738	1720-1724
1739-1743	1725-1729
1744-1748	1730-1734
1749-1753	1735-1739
1754-1758	1740-1744
1759-1763	1745-1749
1764-1768	1750-1754
1769-1773	1755-1759
1774-1778	1760-1764
1779-1783	1765-1769
1784-1788	1770-1774
1789-1793	1775-1779
1794-1798	1780-1784
1799-1803	1785-1789
1804-1808	1790-1794
1809-1813	1795-1799
1814-1818	1800-1804
1819-1823	1805-1809
1824-1828	1810-1814
1829-1833	1815-1819
1834-1838	1820-1824
1839-1843	1825-1829
1844-1848	1830-1834
1849-1853	1835-1839
1854-1858	1840-1844
1859-1863	1845-1849
1864-1868	1850-1854
1869-1873	1855-1859
1874-1878	1860-1864
1879-1883	1865-1869
1884-1888	1870-1874
1889-1893	1875-1879
1894-1898	1880-1884
1899-1903	1885-1889
1904-1908	1890-1894
1909-1913	1895-1899
1914-1918	1900-1904
1919-1923	1905-1909
1924-1928	1910-1914
1929-1933	1915-1919
1934-1938	1920-1924
1939-1943	1925-1929
1944-1948	1930-1934
1949-1953	1935-1939
1954-1958	1940-1944
1959-1963	1945-1949
1964-1968	

JUMLAH PERJULUAN TINGKAT DI INDONESIA



Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) | 14. Penderita Gangguan Jiwa (PGJ) |
| 2. Anak Terlantar | 15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) |
| 3. Anak Terlantar dengan Cacat | 16. Korban Pencusangan/kecurangan |
| 4. Anak Terlantar | 17. Korban Pemerkosaan |
| 5. Anak dengan Cacat Fisik (ACF) | 18. Korban Tindak Kekerasan |
| 6. Anak yang Dirampas dan Pemerkosaan Fisik | 19. Korban Penganiayaan Berat (PBB) |
| 7. Anak yang Dirampas | 20. Korban Bencana Alam |
| 8. Penyandang Disabilitas | 21. Korban Bencana Sosial |
| 9. Tindak Kekerasan | 22. Korban Bencana Sosial |
| 10. Bencana Alam | 23. Korban Bencana Sosial |
| 11. Penganiayaan | 24. Korban Bencana Sosial |
| 12. Penganiayaan | 25. Korban Bencana Sosial |
| 13. Korban Bencana | 26. Korban Bencana Sosial |

PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2012

Kegiatan perguruan tinggi dalam pendataan

1. Kemudahan perguruan tinggi dalam menerima Quality assurance sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perguruan tinggi khususnya yang terkait basic
2. Kebijakan tinggi tidak menabrakan kebijakan lain, pemberdayaan lembaga TRK-PTK dalam bidang implementasi
3. Kerja sama perguruan tinggi dengan pemerintah sangat penting untuk peningkatan mutu dan layanan

Rekomendasi

1. Wakil bupati sebagai kepala dinas pendidikan dan kepala pembekalan
2. Penetapan implementasi indikator dalam bentuk digital
3. Guna sebagai indikator sistemasi, di mana persiapan kinerjanya berada
4. Membantu daerah untuk dapat lebih
5. Membantu ditetapkannya sebagai pendamping lapangan
6. Komitmen untuk pemertanian dalam rangka dan pemerintah daerah sebagai indikator, pengkembangan dan harmonisasi dalam meningkatkan pemertanian lokal



Rekomendasi

1. Untuk faktanya, apakah benar ada ancaman terhadap kemerdekaan?
2. Apakah yang harus dilakukan masyarakat sipil?
3. Apakah ada upaya konkret di bidang pengawasan yang ada?
4. Bagaimana peran ja sosial di bidang ini?
5. Bagaimana di bidang sebagai pemantau yang penting?
6. Bagaimana untuk memperkuat sistem hukum dan pemerintahan daerah?

Syahrir Ika

Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

CURRICULUM VITAE

IR. SYAHRIR IKA

KETUA PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENELITI INDONESIA

Riwayat Pendidikan

- S1 Fakultas Peternakan UNDANA Kupang
- S2 Magister Manajemen Universitas Trisakti Jakarta



Organisasi

- Wakil Sekjen Pengurus Pusat Pesatuan Insinyur Indonesia (PII), 2006-2012
- Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO), 2018-2023

Riwayat Pekerjaan

- Staf pada Kantor Menko Ekuin dan Wadbang, 1985-1988
- Staf pada Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan Departemen Keuangan, 1988-1996.
- Peneliti Madya pada Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan, 1999-2011.
- Peneliti Ahli Utama pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2012-sekarang
- Direktur Umum dan SDM PT Antam Tbk (2003-2008)
- Direktur Utama BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, 2017-2018.



HIMPUNAN PENELITI INDONESIA (HIMPENIDO)
INDONESIAN RESEARCHER UNION (IRU)

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Syahrir Ika
Ketua Umum Pengurus Pusat HimpENIDO

Disampaikan pada Acara FGD Badan Kasihlan Setan DPR RI
Jakarta, 04 Mei 2021



HIMPENIDO

PENDAHULUAN



HIMPENINDO

KEBIJAKAN KOMPREHENSIF MENGATASI DAMPAK PANDEMI COVID-19

Pandemi Covid-19 telah memporakporandakan perekonomian dunia termasuk Indonesia, baik dari aspek sosial maupun ekonomi dan keuangan. Pertumbuhan ekonomi terganggu karena terjadi demand and supply shock. Semua faktor pembentuk produk domestik bruto (PDB) mengalami penurunan terus sehingga ekonomi Indonesia terlempar.

Pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi yang cukup dalam: 4% hingga 7% pada 2020 (IMF, WB, OECD). Guncangan ekonomi dunia ini telah berdampak pada perekonomian Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung. Kuartal I 2020 ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,79%, kuartal II 2020 minus 5,23% dan kuartal III 2020 minus 3,40%. Di akhir tahun BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh minus 2,19 persen.

Pemerintah telah mengambil kebijakan yang komprehensif untuk menyelamatkan rakyat dan perekonomian Indonesia. Efektivitas penanganan kesehatan adalah kunci recovery. Pemerintah menerapkan anggaran sebesar Rp695,2 triliun pada 2020 untuk mendukung program kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebagian besar anggaran PEN dialokasikan untuk mendukung program-program perlindungan sosial. Sebagian lagi digunakan untuk mendukung kegiatan UMKM dan pembiayaan korporasi. Dalam kondisi kritis ini, belanja pemerintah menjadi faktor 20 persen yang akan menyebabkan terjalinya yang 80 persen.



PERTUMBUHAN EKONOMI MENUNJUKAN TREK PEMULIHAN

Belanja pemerintah berhasil mendorong pemulihan ekonomi!

HIMPENINDO



• Pemerintah berperan sebagai sentral pemulihan, menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh positif. Komponen pengeluaran lainnya menunjukkan arah perbaikan.

• Arah pemulihan ini akan terus didorong lebih cepat di 2021 melalui APBN yang tetap countercyclical, program vaksinasi yang efektif, dan PEN yang diperluas.





Program Perlingsos efektif menahan penurunan konsumsi RT



- Konsumsi rumah tangga menunjukkan arah pemulihan. Tingkat kecenderungan masyarakat dalam berkegiatan semakin meningkat secara bertahap.
- Konsumsi kebutuhan pokok tumbuh positif. Tanpa Perlingsos (Rp220,4 T), konsumsi RT bisa terkontraksi 5% atau lebih.
- Pemulihan konsumsi lainnya (tidak kelas menengah atas) tertahan akibat masih terbatasnya mobilitas.
- Perlawanan pandemi dan vakasasi menjadi kunci pemulihan konsumsi masyarakat. Akan tetap menjadi prioritas pemerintah.



TREN PEMULIHAN JUGA DITUNJUKKAN DARI SISI PRODUKSI

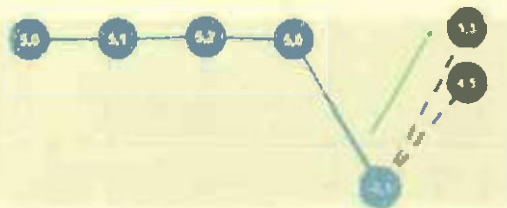


- Sebagian sektor berdaya tahan (*resilient*) tumbuh positif di masa pandemi.
- Sebagian besar sektor strategis yang menghadapi tekanan telah menunjukkan arah pemulihan.
- Kontraksi industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan semakin moderat.
- Pemerintah hadir dalam memberikan bantuan bagi dunia usaha.



PEMULIHAN EKONOMI BERLANJUT DI 2021, DIPROYEKSI TUMBUH 4,5-5,3%

Kebijakan Fiskal dan APBN digunakan secara optimal untuk mendorong momentum pemulihan berkelanjutan



PROJEKSI GROWTH INDONESIA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

	2020	2021
IMF	-1.9	4.8
WORLD BANK	-2.2	4.4
APBN	-2.2	4.5

Sumber: IMF (2020), World Bank (2020), APBN 2021 (Rencana)

FAKTOR PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2021

- Penalaran Covid-19 perlu tetap diwaspadai. Langkah penanganan Covid-19 terus diintensifkan
- Program Vaksinasi mulai berjalan. Vaksinasi sebagai faktor positif menekan penularan dan mengembalikan keyakinan masyarakat untuk beraktivitas ekonomi
- APBN 2021 ekspansif dan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi ke belanja produktif dan penguatan Program PEN
- Implementasi Reformasi Struktural, aturan turunan UU Ciptaker, dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) telah siap. Ini berpotensi mendorong peningkatan *ease of doing business*, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat investasi di 2021



REALISASI SEMENTERA PROGRAM PEN2020 MENCAPAI RP579,78T (83% DARI RP695,2T)

HIMPENINDO

KESEHATAN

Realisasi Sementara
Rp3,51 T

- Tugasku insentif nasional serta belanja intervensi penanganan Covid-19 (Mirpran, biaya klaim, dan vaksin)
- Sebesar Rp47,07 T* akan digunakan untuk program vaksinasi 2021

PERLINDUNGAN SOSIAL

Realisasi Sementara
Rp733,19 T

- Tugasku dukungan daya beli untuk menahan laju peningkatkan kemiskinan dan ketimpangan
- Target untuk KPM pada DTKI, pekerja terdampak, serta peserta dan tenaga didik

SEKTORAL K/L DAN PEMDA

Realisasi Sementara
Rp44,59 T

- Tugasku merupakan program untuk dukungan pemda serta K/L dalam proses pemulihan ekonomi
- Termasuk dukungan pariwisata, padat karya K/L, D/D Pemulihan, OAK Pnuk, serta Food Estate

DUKUNGAN UMKM

Realisasi Sementara
Rp112,44 T

- Tugasku mendukung pertumbuhan dan stabilitas flow UMKM, Jawa Tengah, Sumatera, dan Papua, serta melalui penyalangan pada mitra perantara ekspansi
- Sebesar Rp3,87 T* akan digunakan untuk pendanaan dukungan UMKM/Korporasi 2021

PEMBIAYAANKORPORASI

Realisasi Sementara
Rp40,73 T

- Tugasku dukungan korporasi melalui BUMN dan penjaminan kredit modal kerja
- PMN untuk 6 BUMN dan 2 Lembaga (LPEI dan LPVINA) serta Pinjaman untuk 5 BUMN dalam Rangka PENTOLAH direal Hasi pada akhir Desember 2020

INSENTIF USAHA

Realisasi Sementara
Rp64,12 T

- Tugasku insentif perpajakan untuk menyaga keberlanjutan dunia usaha serta daya beli masyarakat (PPH 21 OTP)
- Analisa Ases insentif fiskal memberikan pengaruh terhadap keberlanjutan usaha W/P
- Dikawat Dalam Realisasi Perantara Percepatan Pajak Rp4,49 T*

Sumber : Kementerian Keuangan



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

- Dalam situasi darurat, khususnya terkait dengan pandemi Covid-19, terdapat banyak transaksi pemerintah yang pelaksanaannya memerlukan penanganan **sangat cepat, mendesak, dan masif**. Hal ini tentunya harus diikuti penguatan **tata kelola yang baik**. Prinsip kehati-hatian, akurabilitas dan transparansi mutlak tetap harus dijaga, agar setiap transaksi keuangan negara dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, capaian opini atau kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan dan terus dapat ditingkatkan.
- Pengelolaan keuangan negara harus berlandaskan prinsip akuntabilitasnya. Di tengah situasi yang luar biasa atau extra ordinary dengan situasi khusus penanganan covid-19 dan PEN, dengan anggaran Rp 695,2 triliun, pemerintah memastikan seluruh anggaran tersebut bisa melindungi negara, bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia dari ancaman covid-19.

Sumber: Konferensi Online 22/9/2020, nasional.kontan.co.id



HIMPENINDO

PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA



HIMPENINDO

MENGAPA PERLU PERLINDUNGAN SOSIAL?

INS TRUMEN UNTUK MENYAPAIKAN SDM YANG SEJAHTERA DAN BERKUALITAS
MENUJU INDONESIA MAJU

01

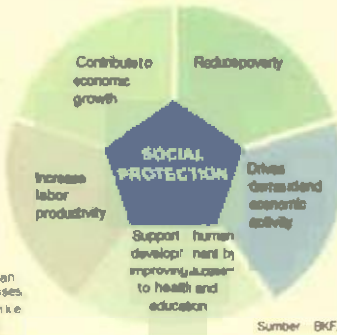
Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi aktivitas ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM

02

Berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja melalui jaminan sosial sehingga dapat bekerja lebih produktif dan penghasilan lebih baik

03

Berkontribusi ke pembangunan SDM dengan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan ke kesehatan dan pendidikan



04

Mencegah individu dan keluarganya jatuh miskin atau tetap berada dalam kemiskinan dan mitigasi dari krisis/shock

05

Mendorong pertumbuhan dan aktivitas ekonomi antara lain melalui pemberian bantuan sosial

Sumber: BKK, Kementerian Keuangan

11



SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL PADA DASARNYA TELAH DIBERIKAN SEPANJANG HAYAT (FROM WOMB TO TOMB)

Namun cakupannya untuk kelompok tertentu sangat kurang dan masih menghadapi berbagai tantangan



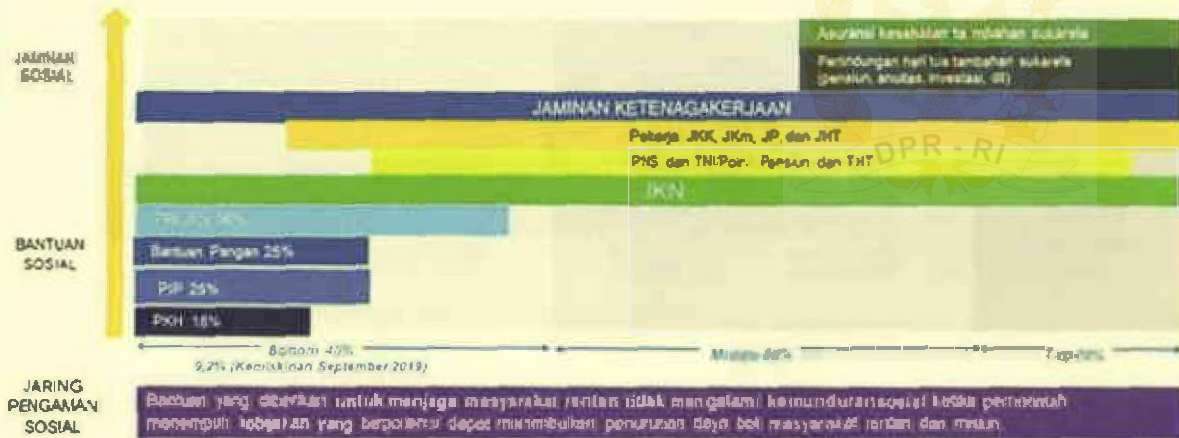
Sumber: BKK, Kementerian Keuangan

HIMPENINDO

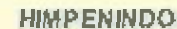
Menurut global best practice, perlintos terdiri dari:

- Jaminan sosial
- Bantuan sosial
- Jaring pengaman sosial di masa krisis/darurat (social safety net)
- Dukungan ketenagakerjaan (active labor market program)
- Untuk Indonesia, masih belum jelas definisi dan cakupan perlintos (inkonsistensi peraturan dan klasifikasi)

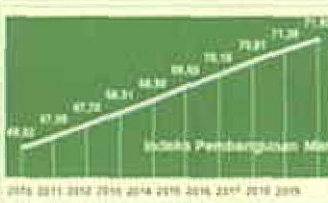
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL



Sumber: BKF, Kementerian Keuangan



Namun Melambal



Sumber : BKF, Kementerian Keuangan

- Perluamban PDB sebesar 11%
 - Target: Ketersisiran 0,187 pp (2010-2014)
 - Target: Ketersisiran 0,063 pp (2015-2018)
- Indeks Ketersisiran nasional menunjukkan kelompok menengah (GR0 38)
- Transformasi dan penguatan Badan Perundingan Sosial (ms PKH, dan KarsuSenabak) dan subsektor lainnya diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan

- TPI Unitas Jember universitas meningkat 487% (2016) → 557% (2019)
- Peru bekerja sama untuk meningkatkan keterampilan profesional dan menciptakan lapangan kerja
- Berikan implementasi dari Prokera dan naseh superendorektorisasi untuk memperbaiki ss supply dan pasar nagalera



HIMPENINDO

DTKS YANG MENCAKUP 40% PENDUDUK TERBAWAH DIJADIKAN JANGKAR DALAM PENENTUAN PENERIMA BANTUAN

DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL



DTKS BERBASIS KELUARGA	
Jumlah Penduduk Indonesia	27.040.751
Jumlah Keluarga (KK)	20.003.939
Jumlah Penduduk Urban	97.348.064
DTKS BERBASIS NON-KELUARGA	
Jumlah Penduduk (Jawa)	636.638

Keppensos No. 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020

Sumber: BKF, Kementerian Keuangan



PENERIMA JARINGAN PENGAMAN SOSIAL DALAM DTKS MENURUT LAPANGAN USAHA

HIMPENINDO

Penerima JPS terbesar a. L. (1) petani, peternak, dan pekebun, (2) pedagang dan pekerja sektor swasta, (3) pekerja bangunan, dan (4) pekerja pabrik

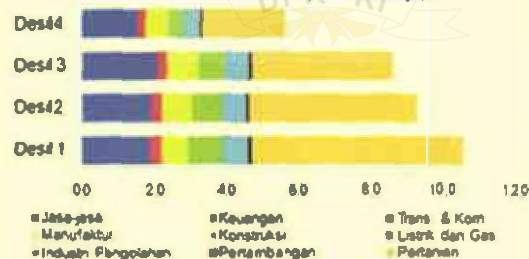
Sebaran Penerima Bansos (Juta Pekerja)



Catatan: estimasi BKF berdasarkan DTKS 3, pada basis rumah tangga (14,1 juta pekerja), rata-rata 1,6 pekerja per KPR

Penerima JPS semakin banyak pada penduduk lebih miskin (pada bottom 40%), di mana mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Sebaran Penerima Bansos Menurut
Pendapatan dan Lapangan Usaha
(Juta Pekerja)



Sumber: BKF Kementerian Keuangan

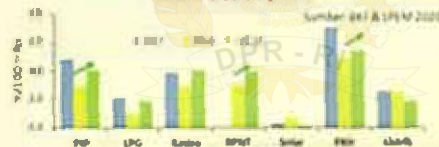


HIMPENINDO)

PERLINSOS YANG DIBERIKAN MELALUI BANSOS DAN JAMSOS MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN DI SISI EFEKTIVITAS, CAKUPAN, DATA, DAN INSTITUSIONAL

Institusional	• Mekanisme koordinasi antar lembaga di level terdistribusi perlu lebih diperkuat, terutama di tingkat kabupaten/kota, mengingat pentingnya koordinasi antar lembaga di tingkat ini
Efektifitas	• Perlu keterlibatan semua dan keterpaduan program manfaat untuk masyarakat • Perlu program berbasis komunitas • Perlu koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program
Cakupan	• Perlu koordinasi yang lebih baik dan memperkuat koordinasi antar lembaga • Perlu koordinasi yang lebih baik dan memperkuat koordinasi antar lembaga
Perencanaan dan koordinasi	• Perlu koordinasi yang lebih baik dan memperkuat koordinasi antar lembaga
Base data dan sistem informasi	• Perlu koordinasi yang lebih baik dan memperkuat koordinasi antar lembaga

Efektifitas Bansos untuk Perumahan Angg. Mampu Jarak & Jarak namun Belum Optimal



KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PERLU DIKUKuhkan

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

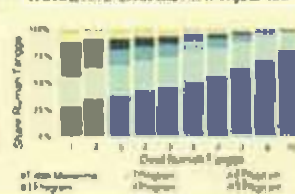
Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

Perlu Diperkuat

TARGETING error masih menjadi isu



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010

PR
2010
2010

Sumber: TNP2K, Task Force BKA, Program Reranca & PMK, Kemendagri, Kemendiknas



TANTANGAN (2): TARGETING ERROR, KECUKUPAN MANFAAT, DAN EFEKTIVITAS

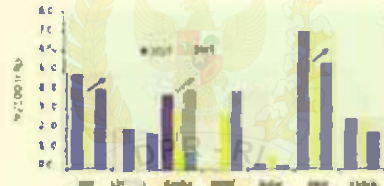
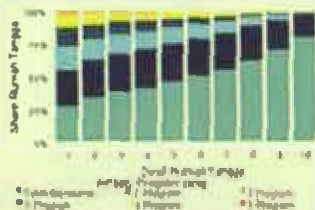
1. Komplementaritas antarprogram perlu diperbaiki
2. Ketepatan sasaran masih menjadi tantangan (*Exclusion dan inclusion error*)
3. Kecukupan dan nilai manfaat yang belum memadai $\rightarrow$ Adanya *trade-off* antara cakupan penerima dan nilai manfaat
4. Efektifitas rendah dalam menurunkan angka kemiskinan membuat namun masih belum optimal

KOMPLEMENARITAS antarprogram masih

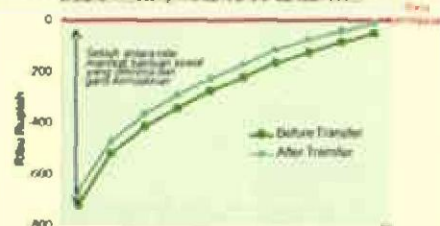


Sumber: Survei Monev 2009 Program

TARGETING Error masih menjadi

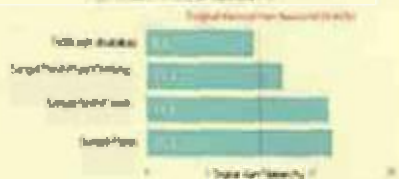
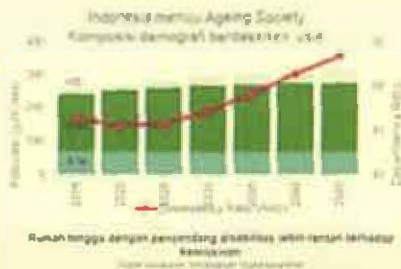


Program ekuitas belum dapat menutup *poverty gap* Distance Recovery line dan transfer bantuan sosial





TANTANGAN (3) CAKUPAN, DATA, KUALITAS IMPLEMENTASI, DAN PERLINSOS DI MASA KRISIS



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

1. Perlinsos bagi kelompok rentan dan pemandang disabilitas masih sangat kurang

- Struktur demografi Indonesia menuju aging society telah melahirkan bagi 6 kelompok rentan masuk target prioritas.
- Belum ada program perlinsos yang ada di masyarakat mengenai bagi kelompok disabilitas padahal para pendang disabilitas memiliki kontribusi ekonomi yang tinggi.

2. Belum siapnya infrastruktur jaringan pengaman sosial adaptif untuk merespon krisis

- Jaringan pengaman sosial saat ini masih bersifat ad-hoc belum melembaga dengan adaptif terhadap formal yang sudah terintegrasi dalam digunakan untuk merespon krisis seperti pandemi Covid-19 saat ini.

3. Cakupan Jaminan Kesehatan Kesenjangan masih rendah khususnya untuk pekerja informal hingga petani

4. Penyebaran program Jaminan Kesehatan Petenjem yang diarahkan Ulu Opa Mera

5. Perluaya basis data yang akurat dan sistem informasi yang terintegrasi

6. Perlu penguatan kualitas implementasi program perlinsos → kesiapan infrastruktur kesehatan dan teknologi informasi untuk pemfakutan, koordinasi Pusat dan daerah



HIMPENINDO

BANSOS MENINGKAT & PENYERAPANNYATINGGI,

Namun Masih Menghadapi Tantangan

Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran Dan Belum Optimal Dampaknya Terhadap Penurunan Kemiskinan

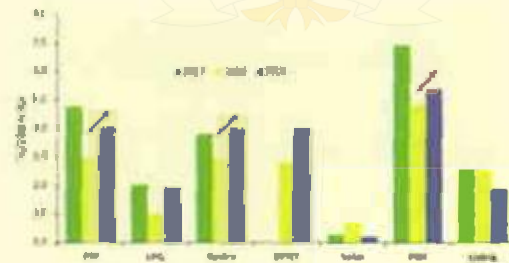
1

Reklasifikasi bansos (2016), perluasan manfaat, transformasi subsidi rastra ke BPNT (2018), dan respon terhadap pandemi (2020)



2

Efektivitas bansos dalam menurunkan angka kemiskinan menunjukkan perbaikan namun masih belum optimal



Sumber: BPS & LPEM 2020, Kementerian 2021



HIMPENINDO

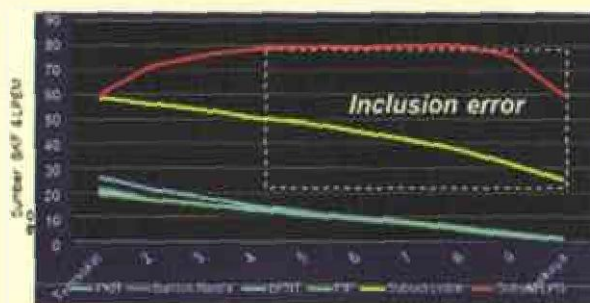
BANSOS MENINGKAT & PENYERAPANNYA TINGGI,

Namun Masih Menghadapi Tantangan

Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran Dan Belum Optimal Dampaknya Terhadap Penurunan Kemiskinan

3

Bansos dan subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran → masih dinkmati keluarga di desil 5-10 dan masih terdapat keluarga (desil 1-4 yang belum menerima bansos



Sumber: Kementerian Keuangan 2021

41

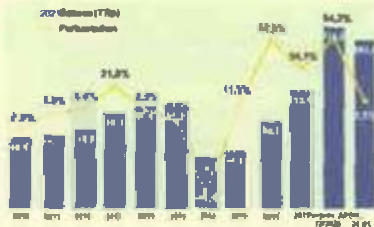


DINAMIKA BELANJABANSOS

HIMPENINDO

*Dipengaruhi oleh Penyempurnaan Kebijakan
Penajaman/Reklasifikasi Bansos, Transformasi Subsidi Rastra,
dan Respon Terhadap Pandemi*

PERKEMBANGAN ANGGARAN BANSOS



1. Dalam periode 2010-2019, bansos tumbuh rata-rata 7,9% dan untuk tahun 2020 tumbuh signifikan 54,8% untuk merespon Covid-19.
2. Terhadap PDB, bansos tumbuh 0,78% (2010-2019) dan mencapai di atas 1% pada tahun 2020 yaitu mencapai 1,04%.
3. Selain untuk respon pandemi covid-19, kenaikan bansos tahun 2020 disebabkan kenaikan iuran PBI JKN sehingga anggaran naik hampir 2x lipat.

Sumber: Kementerian Keuangan 2021



HIMPENINDO

DATA TERPADU KESEJEHTERAAN SOSIAL (DTKS)



DTKS DAN KEGUNAANNYA

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia



Memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

Membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran Jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program.

Sumber : TNP2K, Tn Wibowo, Kemerkau., 2021

26



KRITERIA MISKIN

Dari Sisi Finansial

- RT yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan
- Sumber data : Susenas (survei)
- Tahun 2019 : 315,6 ribu RT

Dari Sisi Karakteristik RT

- Lues dan jenis lantai tempat tinggal
- Dinding dan Atap rumah
- Fasilitas pencahayaan
- Sumber air minum
- Kemampuan menyekolahkan anak
- Kesehatan/orbol

Mematikan ?

Direktori Pengetahuan



1. Sangat Miskin, 10% terendah
2. Miskin, 10 – 20 % terendah
3. Hampir Miskin, 20 – 30% terendah

Sangat Kaya

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial RI No 148/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pandataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Sumber : TNP2K, Tn Wibowo, Kemerkau., 2021

27



HIMPENINDO

PERMENSOS No 5/2019 TENTANG PENGELOLAAN DTKS



PEMANFAATAN



Sumber : Kementerian Sosial, 2021

**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Sumber: Kementerian Sosial, 2021



HIMPENINDO

MEMBANGUN BASIS DATA TERPADU

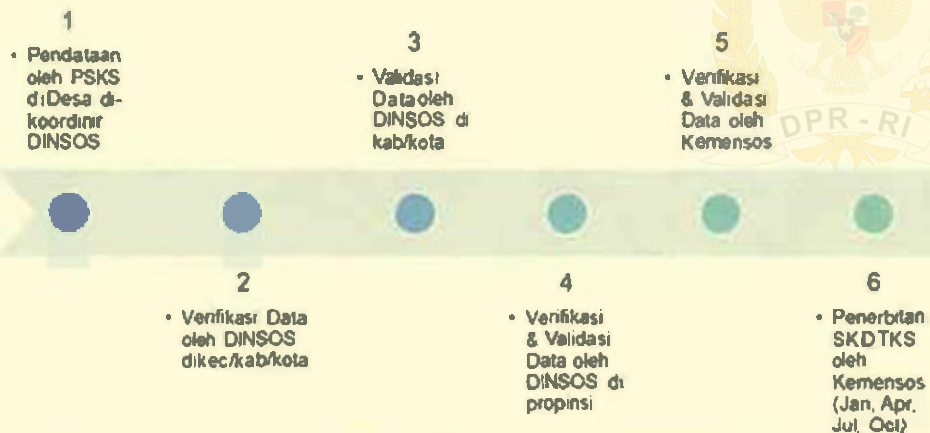


Sumber : Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, 2021, diolah



HIMPENINDO

Pengelolaan DTKS: Verifikasi dan Validasi



Sumber : Tri Wibowo, Kementerian Keuangan, 2021, diolah

Perencanaan Pembangunan dan Pembangunan

- Jaminan dan Sosial**
 - pengaturan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak sosial
 - pengaturan jaminan sosial
 - pengaturan jaminan sosial
- Pembangunan lingkungan**
 - pengaturan lingkungan
 - pengaturan lingkungan
 - pengaturan lingkungan
- Pembangunan kesehatan**
 - pengaturan kesehatan
 - pengaturan kesehatan
 - pengaturan kesehatan
- Pendidikan akses pendidikan**
 - pengaturan pendidikan
 - pengaturan pendidikan
 - pengaturan pendidikan
- Pembangunan ekonomi**
 - pengaturan ekonomi
 - pengaturan ekonomi
 - pengaturan ekonomi
- Pembangunan infrastruktur**
 - pengaturan infrastruktur
 - pengaturan infrastruktur
 - pengaturan infrastruktur
- Pembangunan sumber daya manusia**
 - pengaturan sumber daya manusia
 - pengaturan sumber daya manusia
 - pengaturan sumber daya manusia
- Pembangunan teknologi**
 - pengaturan teknologi
 - pengaturan teknologi
 - pengaturan teknologi
- Pembangunan kebudayaan**
 - pengaturan kebudayaan
 - pengaturan kebudayaan
 - pengaturan kebudayaan
- Pembangunan lingkungan**
 - pengaturan lingkungan
 - pengaturan lingkungan
 - pengaturan lingkungan

Variable: Maneiras BPNT

- Sumber Achmadi Jayapura dkk (2019) diolah



KESULITAN MENERAPKAN GRADUASI

Terdapatnya gradasi terhadap KPM idealnya merupakan suatu indikasi telah berubahnya status kehidupan KPM dan kondisi rumah mereka lebih sejahtera. Kemandirian KPM dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan lain sebagainya. Namun melakukan sosialisasi kepada KPM ternyata bukanlah hal yang mudah bagi para Pendamping KPM maupun BPNT. Beberapa kesulitan:

4. Indikator Kemiskinan Indikator kemiskinan yang umumnya berbeda-beda di setiap daerah yang juga berbeda dengan indikator kemiskinan Kementerian Sosial dan BPS juga menjadi problem tersendiri dalam penetapan gradasi.	5. Perbedaan Masyarakat Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik masyarakat, budaya, adat istiadat, ekonomi, pendidikan dan KPM bahwa mereka telah mengalami perubahan ekonomi atau mampu bekerja mandiri, atau belum.	6. Angka Kemiskinan Terdapatnya angka kemiskinan di beberapa daerah, menjadikan perbedaan masyarakat, budaya, adat istiadat yang berbeda-beda. Dengan demikian, perbedaan data kemiskinan yang akan digunakan untuk menetapkan gradasi, maka akan sangat mempengaruhi gradasi.
---	---	--

Sumber: Achmad Jayapura dkk (2019) diolah



HASIL KAJIAN PENELITIAN KEMENSOS TENTANG DTKS DI 6 KABUPATEN/KOTA(1)

Pengelolaan DTKS belum efektif

Pengelolaan DTKS masih amatiran. Tidak ada petugas khusus, umumnya pendamping PKH. Anggaran terbatas sehingga di beberapa daerah masih numpang pos anggaran lain.

Ada dualisme jalur verifikasi dan validasi data (TNP2K vs Kemensos)

Koordinasi antar instansi belum baik. Pengelola di daerah tidak seragam, ada yang dikelola Bappeda, ada juga yang dikelola Dinas Sosial.

Kementerian sosial belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan harmonisasi data. Selama ini hanya Peraturan Menteri.

Keterbatasan SDM di Dinas Sosial. Data diambil saat kunjungan ke daerah pada program yang lain. Ada alasan keterbatasan anggaran dan SDM.

Tidak banyak OPD yang memanfaatkan DTKS. Dari 40 OPD yang disurvei, hanya 5 OPD yang paham dan memanfaatkan DTKS. Banyak OPD yang belum memahami UU.

Sumber: Mayada & Manggolan 2018
Diadaptasi dari Himpennindo 2021



HASIL KAJIAN PENELITI KEMENSOSTENTANGDTKS DI6 KABUPATEN/KOTA (2)

Pengelolaan
DTKS belum
efektif

Ada persoalan pada kapasitas kelembagaan, terutama di 3 aspek (SDM, kelembagaan, dan system)

Mekanisme untuk memanfaatkan atau akses ke DTKS di beberapa daerah dirasakan menyulitkan (birokratis)

Kelidaksesuaian data antar dinas di daerah. Di beberapa daerah data sektor pertanian dan PUPR tidak ada dalam DTKS.

Penerima manfaat banyak yang ditetapkan berdasarkan ~~nama~~ *nama* ~~clanum~~ *clanum* ~~kelurahan~~ *kelurahan* atau tim sukses) → *Minor Hazard*

Payung hukum dalam pengelolaan DTKS di beberapa Pemda belum didukung Perda

DTKS *masih* ~~dipertanyakan~~ *dipertanyakan* kualitasnya karena banyak terjadi *inclusion error* dan *exclusion error*

Sumber: Wayad a
Nangolan, 2018. Data: PP
Himpennindo 2021



HASIL KAJIAN PENELITI BKF TENTANG PERKEMBANGAN GRADUASI PKH DI JAWATENGGAH(1)

Peserta PKH

- Selama 2001-2016 meningkat 5 kali lipat, dan 7 menjadi 35 kabupaten/kota
- Mulai tahun 2015, semua kabupaten/kota telah masuk dalam kepesertaan PKH

Jumlah KPM

- Selama 2011-2016 meningkat 9 kali lipat, dan 103 ribu menjadi 962 ribu
- 87% masih memenuhi syarat sebagai RT penerima PKH
- 13% RT PKH tidak memenuhi syarat lagi karena tergradiasi. Dari 13 % tersebut, 6% sudah mampu secara ekonomi dan 3% sudah mandiri

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Demak telah berjalan baik.

- Sampai dengan April 2017, 16,4% KPM tidak lagi memenuhi syarat atau *tergradiasi*

Sumber: Tinjauan Kependidikan 2018 POC PP Himpennindo 2021



HASIL KAJIAN PENELITI BKF TENTANG PERKEMBANGAN GRADUASI PKH DI JAWA TENGAH (2)

Tantangan yang Dihadapi oleh Pendamping

- Mengeluarkan KPM yang terindikasi mampu secara finansial dan kepesertaan PKH
- Pihak Desa tidak selalu memberikan data dukung berupa surat keterangan mampu bagi KPM karena khawatir terjadi protes dari KPM → Masalah sosial politik di tingkat Desa

Kendala yang Dihadapi

- Banyak rumah penduduk di pedesaan yang tidak layak untuk dikunjungi karena kondisi jalan yang buruk, sehingga sulit untuk diakses
- Banyak rumah penduduk yang tidak layak untuk dikunjungi karena kondisi jalan yang buruk, sehingga sulit untuk diakses
- Banyak rumah penduduk yang tidak layak untuk dikunjungi karena kondisi jalan yang buruk, sehingga sulit untuk diakses
- Banyak rumah penduduk yang tidak layak untuk dikunjungi karena kondisi jalan yang buruk, sehingga sulit untuk diakses

Sumber: Tim Wawancara Kemandirian 2018 & QD PP Himpennindo 2021



PENTINGNYA AKUNTABILITAS DALAM PENGELOAAN KEUANGAN NEGARA



HIMPENINDO

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM TATAKELOLAKEUANGAN NEGARA YANG BAIK

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik atau buruknya pemerintahan bisa dinilai juga telah menerapkan suatu prinsip-prinsip *good governance*.

Prinsip-prinsip *good governance* dalam mendukung pemerintahan yang baik adalah :

- Partisipasi Masyarakat
- Transparansi
- Peduli kepada Stakeholder
- Tegaknya Supremasi Hukum
- Visi Strategis
- Berorientasi pada Konsensus
- Kesetaraan
- Efisien dan Efektivitas
- Akuntabilitas



HIMPENINDO

MEKANISME AKUNTABILITAS TATAKELOLA KEUANGAN NEGARA

Terdapat tiga elemen utama dalam mekanisme akuntabilitas tata kelola keuangan negara:



Pengguna Anggaran

Prinsip-prinsip Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Negara



Terdapat tiga elemen utama dalam mekanisme akuntabilitas:

- Basis data yang akurat
- Keterbacaan data
- Ketersediaan data
- Koordinasi data
- Pemutakhiran data
- Evaluasi pelaksanaan
- Musabaha, leq, desa
- Indusion error
- Exclusion error
- Material hazard

Pencapaian Tujuan Negara



HIMPENINDO

Rekomendasi

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan OTKS, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah sbb.

Sinkronisasi peraturan di semua Kementerian/Lembaga dan Pemda terakait dengan DTKS dan graduasi.

Perlu adanya kesepakatan antar K/L tentang indikator kemiskinan.

Penetapan KPM harus melalui musyawarah desa (Musdes) yang didamogingi komite independen yang dibentuk pemerintah daerah

Mengevaluasi efektivitas program bansos menggunakan parameter *inclusion error*, *exclusion error*, *moral hazard*, dan *graduasi*.

Meningkatkan kapasitas anggaran dan sumberdaya (SDM maupun anggaran serta infrastruktur penunjang yang berbasis elektronik).

Meningkatkan literasi kepada KPM penerima PKH dan BPNT bahwa bantuan pemerintah yang selama ini diterima oleh warga miskin bukanlah bersifat permanen atau selamanya.



HIMPENINDO

TERIMA KASIH

Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini

Marjuki & Suharma

New DTKS: Permasalahan, Tantangan dan Peran Politeknik
Kesejahteraan Sosial Bandung

CURRICULUM VITAE

Dr. Marjuki, M.Sc

DIREKTUR POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tempat/Tanggal Lahir:

Lunajang, 10 November
1960

Jabatan Akademik:

Lektor Kepala



PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
1985	Sarjana	STKS Bandung	Pekerjaan Sosial
1991	Magister/ S2	Asian Institute Of Technology Bangkok	Human Settlement Development
2004	Doktor/S3	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Pendidikan Luar Sekolah

PENGALAMAN BEKERJA

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

TMT	Jabatan	Tahun	Jenis Penelitian	Konsep/tema/tema	Berikut Nama
03 September 2019	Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	2015	Desa Sejahtera Mandiri Kasejahteraan	Konsultasi	Pusat Riset Kasejahteraan Sosial
2002	Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung				
26 Desember 2019	Staf Ahli Menteri Bidang Akademi Sosial	2009	Pekerja Migran di Timur Tengah	Konsultasi	Universitas Andalas
1 Agustus 2010	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial				
27 Januari 2012	Staf Ahli Menteri Bidang Rehabilitasi Sosial	2006	Sertifikasi Hasil Penelitian tentang "Strategi Pengembangan Kemandirian Berbasis Institusi Lokal"	Penelitian	Universitas Andalas
4 Agustus 2010	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial				
2003	Ketika STKS Bandung				

Marjuki & Suharma

New DTKS: Permasalahan, Tantangan dan Peran Politeknik
Kesejahteraan Sosial Bandung

CURRICULUM VITAE

SUHARMA, PH.D

KEPALA LEMBAGA PENELITIAN POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tempat/Tanggal Lahir

Majalengka, 15 Maret 1968

Jabatan Akademik

Dosen

Tempat kerja: Kementerian Sosial RI (Unit Kerja

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Polteksos)



Pendidikan : Social Work (*Social Policy and Social*
Terakhir *Servicess*) Universiti
Sains Malaysia (USM)

Keahlian : 1. Penanganan Kemiskinan
2. Kebijakan dan Pelayanan Sosial
3. Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Pengalaman : 1. Pengembangan Modal Sosial dalam
Penelitian *Penanganan Kemiskinan d Indonesia*
(utama) 2. Survey Kesejahteraan Sosial Dasar (SKSD)
di 12 Provinsi di Indonesia
3. Pelayanan Sosial Terpadu Dalam
Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial secara Cepat, Tepat,
dan Tuntas

4. Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan

Pengalaman : Panitia Kerja Pemerintah Penyusunan UU
Kerja (utama) Nomor 14 Tahun
2019 Tentang Pekerja Sosial



NEW DTKS

Permasalahan, Tantangan, dan Peran
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Oleh:

Dr. Maruki, M.Sc.

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Permasalahan

Belum adanya legal format yang menjadi landasan dalam bentuk Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Manfaat Sosial Dampaknya, data dan mekanisme Verifikasi belum menjadi pedoman Bersama-jalur Kementerian-Lemaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

New DTKS baru memperbaiki data ganda sebanyak 21.156.000 data, bagaimana dengan ketepatan sasaran antara penerima manfaat pada New DTKS?

Terdapat perbedaan pengukuran antara Verifikasi pada New DTKS dengan pengukuran pada awal penetapan DTKS melalui PPLS 2005 yang menggunakan Proxy Mean Test (PMT) mengacu pada PMT World Bank.

Sinkronisasi antara penetapan jumlah penerima manfaat pada New DTKS dengan Pencerdasan dan Target Sabaran bantuan Sosial (Data Mukho) masih menjadi masalah.

New DTKS lebih fokus pada data Keluarga miskin (PKKS yang ada pada Keluarga Miskin/Sangat Miskin) atau "Berada di pada Keluarga". Bagaimana dengan PKKS yang lainnya yang berasal individu, apakah sudah masuk pada New DTKS? (Perlindungan dan Pengentasan Anak Jalanan, Penyandang Disabilitas Berat yang berasal dari Keluarga "tidak miskin", penyalahguna NAPZA dll)



VERIFIKASI DAN VALIDASI

Verivali yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah yang tidak diikuti oleh penetapan kriteria penerima manfaat/kriteria PPKS, instrumen, Metode, Teknik, dan SOP Verivali yang jelas, serta SDN yang terampil, akan menimbulkan "BENCANA DATA PENERIMA MANFAAT/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial-PPKS"



Faktor dominan yang mempengaruhi

"Kualitas/Quality Assistance DTKS" melalui **verivali**



1

Schedule/waktu pelaksanaan Verivali (Kondisi Penerima Manfaat berubah dengan cepat)

2

Indikator/Kriteria/Parameter Penerima Manfaat

3

Instrumen Verivali



Metode, Teknik, dan Mekanisme Verivali



Sumber Daya Manusia

Tantangan (1)

Jika DTKS merupakan Data Terpadu, maka hendaknya data pada DTKS tidak hanya memuat data Pendula Manfaat yang berbasis pada Keluarga Miskin, tetapi harus mengacu pada data PPKS yang mengacu pada jenis PPKS menurut Permensos Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pengumpulan Data PMKS/PPKS dan PSKS.

Jika kriteria/parameter PPKS menjadi faktor dominan yang mempengaruhi kualitas DTKS, maka Permensos Nomor 08 Tahun 2012 yang memuat kriteria/indikator/parameter PPKS harus ditinjau ulang/direvisi.

Jika DTKS merupakan Basis Data Terpadu dan "satu data", maka hendaknya Permensos Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Walidata dan Produsen Data Bidang Kesejahteraan yang mengklasifikasi 3 klasifikasi data (1. Data terpadu kesejahteraan sosial; 2. Data nasional penyandang disabilitas; dan 3. Data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar data terpadu kesejahteraan sosial) perlu ditinjau ulang/direvisi.

Tantangan (2)

Jika verifikasi didelegasikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana Permensos Nomor 28 Tahun 2017⁷ tentang Pedoman Verifikasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Gering Tidak Mampu, maka perlu disiapkan kriteria PPKS, instrumen verifikasi, dan SDM serta metode dan Teknik verifikasi yang jelas.

Jika verifikasi dilaksanakan secara rutin 6 (enam) bulan sekali, maka hendaknya disiapkan SDM yang terlatih dan terampil.

Jika laman <https://cekbar.sos.kemensos.go.id> menjadi bagian penting untuk meningkatkan transparansi data, maka hendaknya diikuti oleh mekanisme pengaduan yang jelas dan transparan.

Jika DTKS menjadi bagian penting dan strategis untuk menjadi "satu data", maka hendaknya perlu didukung oleh Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial yang memuat DTKS sebagai "satu data" penerima bantuan sosial.



Peran Poltekesos Bandung

Dalam Pengembangan DTKS

Poltekesos Bandung berperan dalam rangka mendukung terdapatnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai keterampilan, wawasan, pemahaman dan keahlian khusus untuk melaksanakan kebijakan dan program Kementerian Sosial RI (Keppres RI Nomor 34 Tahun 2017).

1

Tujuan Poltekesos Bandung adalah dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan sumber daya manusia terdidik dan profesional di bidang Kesejahteraan sosial. Poltekesos Bandung mempunyai tugas memfasilitasi, meningkatkan nilai pekerja sosial profesional yang mampu berperan aktif sebagai tenaga ahli dalam pembangunan kesejahteraan sosial. (Permenas RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang DTK Poltekesos Bandung).

Program Studi dan Profil Lulusan



Prodi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan

Publikasi Internet
Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter)

Komunitas Sosial

Analisis Masalah Sosial

Analisis Sumberdaya Sosial

Analisis Pemberdayaan Sosial

Prodi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan

Pengorganisasian Program
Rehabilitasi Sosial

Pengorganisasian Program
Rehabilitasi Sosial

Analisis Masalah Rehabilitasi
Sosial

Komunitas Rehabilitasi Sosial

Prodi Perlindungan dan Pembertahanan Sosial Program Sarjana Terapan

Analisis Jaringan Sosial

Analisis Pengorganisasian
Sistem Jaringan Sosial

Analisis Pemberdayaan Sosial

Analisis Pemrosesan Lingkungan
Sosial

Analisis Homogenitas
Sosial

Prodi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan

Pengembangan Teknologi
Terapan Pendidikan

Pengembangan Teknologi
Manajemen Human
Services Organisasi / HSO

Pengembangan Teknologi
Pengembangan Komunitas

Analisis Ketahanan Sosial

Unit Keasim
POLTEKESOG BANDING

Unit Keasim
Unit Keasim
Unit Keasim
Unit Keasim
Unit Keasim
Unit Keasim
Unit Keasim
Unit Keasim

Unit Keasim
Unit Keasim
Unit Keasim
Unit Keasim
Unit Keasim
Unit Keasim
Unit Keasim
Unit Keasim



Peran Poltekkes Bandung dalam Pengelolaan DTKS

Menggunakan Query Handbook (H) DTKS melalui

Penyediaan dan Pengendalian IDMI yang mempunyai kewenangan, wawasan, pengalaman dan keahlian

Dalam melakukan Asesmen termasuk pengumpulan data, pembaruan, dan evaluasi parameter PPKS dan PPKS

Pengelolaan Data PPKS dan PPKS

Memeriksa Indikator Parameter PPKS dan PPKS melalui TI dan Kajian

Standarisasi Indikator Parameter PPKS melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Praktikum Program Studi secara rutin setiap tahun

Berbagai Tim Kerja Masyarakat (TKM) di Lokasi Praktikum melaksanakan pengumpulan data sesuai di lokasi praktikum I, II, & Program Studi

Melakukan penelitian sesuai kebutuhan Kementerian Sosial RI



Terima kasih



FOTO KEGIATAN



Dr. Inasentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI



Drs. Helmizar, M.E.
Kepala Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan



